

Membangun Pemilih Cerdas: Edukasi Anti Politik Identitas bagi Mahasiswa dalam Pemilu 2024

Handi Mulyaningsih¹, Hartoyo², Ikram³, Fuad Abdul Gani⁴, Hertanto⁵, Syarief Makhya⁶ & Teuku Fahmi⁷

^{1,2,3,4,7}Jurusan Sosiologi; ^{5,6}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung,

*Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Pemilu telah dilaksanakan pemilu secara langsung sebanyak 4 (empat) kali sejak reformasi. Meskipun demikian, kedewasaan peserta pemilu masih rendah yang ditunjukkan dengan adanya konflik karena politik identitas untuk meraih kemenangan. Problem ini dikhawatirkan muncul kembali pada pemilu serentak tahun 2024. Mengingat dampak politik identitas sangat berbahaya bagi dishamoni sosial sehingga perlu disosialisasikan pentingnya memahami politik identitas dikalangan mahasiswa terutama pemilih pemula. Sosialisasi yang diselenggarakan tanggal 20 Agustus tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pemilih pemula tentang politik identitas. Pemahamannya akan membuat mahasiswa dapat mencermati informasi yang diperoleh dari media sosial secara lebih rasional, dan membuatnya bersikap dan berperilaku rasional dalam menyikapi politik identitas. Sosialisasi dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD), sehingga ada interaksi yang akrab antar peserta dengan narasumber dan fasilitator. Metode ini lebih efektif dan efisien untuk memahami politik identitas, menginternalisasikannya menjadi sikap dan perilaku yang positif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa mahasiswa pemilih pemula memahami bahwa Indonesia multikultur dan potensial munculnya politik identitas. Namun sendi-sendi kebinekaan yang sudah terbangun menjadikan kehidupan yang toleran dan harmonis. Kekhawatiran terjadinya politik identitas cukup beralasan karena efektif untuk memobilisasi pemilih. Tetapi sosialisasi telah meningkatkan pemahaman tentang penggunaan narasai politik identitas dan mendorong rasionalitas yang sehat dalam konteks demokrasi.

Kata Kunci: Pemilu; Asas; Politik Identitas; Pendidikan Politik

1. ANALISIS SITUASI

Setelah peristiwa politisasi identitas pada pemilu tahun 2019, masyarakat berharap penyelenggaraan pemilu 2024 baik karena semua pihak menyadari manfaat dan mudhorotnya politik identitas sehingga semua pihak tidak menggunakan politik identitas. Harapan itu bukan hal yang mustahil sepanjang semua pihak yang terlibat melaksanakan prosedur dan mekanisme yang sudah baik dari praktek demokrasi kita selama ini. Berbagai upaya telah dilakukan misalnya menjadikan pemilih pemula memiliki kesadaran dan kemampuan memilih melalui pelajaran Sosiologi (Fernandes et al., 2023), dan pelajaran PPKN

(Hariyanti, 2023). Upaya lain adalah dilakukan pendidikan pemilih agar terbangun masyarakat yang mampu menggunakan hak politiknya dengan pintar (Rozuli et al., 2018).

Kualitas Pemilu dapat ditingkatkan secara signifikan dengan adanya pemilih yang cerdas berdemokrasi. Pemilih cerdas berdemokrasi tidak hanya memahami prinsip dan tujuan demokrasi, tetapi juga mampu bersikap kritis terhadap praktiknya, serta terampil dalam memperjuangkan kepentingan politik publik.

Pemilih pemula memegang peran strategis dalam sistem demokrasi Indonesia. Mengingat jumlah mereka yang sangat besar dan posisi mereka sebagai generasi penerus bangsa, perhatian serius terhadap kelompok ini menjadi krusial. Di tengah arus informasi yang mudah dan deras, pembekalan pemahaman yang komprehensif mengenai pemilu dan demokrasi menjadi sangat penting. Pemahaman yang kuat ini akan membekali pemilih pemula dengan keyakinan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam praktik pemilu dan demokrasi.

Pada Pemilu 2024, data menunjukkan bahwa generasi Z (usia 12-27 tahun) mencapai 75,94 juta jiwa atau 27,95% dari total pemilih. Sementara itu, generasi Y (usia 28-43 tahun) berkontribusi sebanyak 69,38 juta jiwa atau 28,87%. Kedua kelompok ini, jika digabungkan dalam kategori pemilih muda (usia 17-40 tahun), berjumlah sekitar 107 juta jiwa, merepresentasikan 53-55% dari keseluruhan pemilih (Setiawan, 2023).

Pemilih Pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (Wardhani, 2018), jumlah pemilih pemula yang mendominasi pemilu, menunjukkan bahwa pemilih pemula merupakan kelompok strategis yang menentukan kemenangan calon. Pemilih pemula, berpartisipasi politik karena rangsangan media masa atau elektronik. Para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Namun, pemilu di Indonesia masih berhadapan dengan persoalan politik identitas dapat mengganggu stabilitas negara (Wingarta et al., 2021). Jika politik identitas terus dibiarkan tumbuh subur maka berpotensi melahirkan fasisme, separatisme, dan lain sebagainya (Fajri, 2023). Meski tidak menjadi preferensi utama, generasi Z yang sebagian adalah pemilih pemula mengakses informasi seputar politik melalui media sosial. Mereka mengonsumsi informasi seputar politik sifatnya insidental dan rentang perhatian hanya 8 detik (Evita, 2023). Padahal media sosial telah menjadi media kampanye partai politik yang strategis, namun berhadapan dengan penyebaran informasi yang tidak valid, penggunaan akun bot, dan manipulasi opini (Hutabarat, 2024).

Guna mencegah politisasi identitas pada pemilu 2024 mendatang, maka diperlukan upaya mitigasi berupa penguatan moderasi beragama, mengedepankan etika politik dan gagasan dari para kandidat, serta peningkatan literasi digital bagi pemilih pemula. Dalam konteks tersebutlah, kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pemilih pemula mengenai lingkup pemilu dan kaitannya dengan demokrasi, politik identitas, mencegah politisasi identitas bagi pemilih pemula sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Langkah awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menentukan kelompok sasaran kegiatan yaitu mahasiswa Fisip Unila yang baru semester 2 (dua) yang masih pemilih pemula sebanyak 40 sebagai peserta dengan mempertimbangkan proporsionalitas laki-laki dan perempuan. Panitia mencari lokasi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan yaitu memiliki ruangan yang cukup untuk 40 peserta, ruangan yang cukup untuk ruang gerak peserta. Pentingnya ruangan yang cukup untuk ruang gerak peserta karena kegiatan tidak hanya dilakukan sambil duduk tetapi dengan aktivitas permainan yang mobile agar terjadi interaksi yang erat antar peserta. Hal ini penting agar pelaksanaan FGD berlangsung interaktif di mana peserta saling berbicara, bertukar pendapat, dan berdiskusi untuk menggali lebih dalam mengenai topik yang dibahas. Di dalam FGD dilakukan *brainstorming* tentang konsep Pemilu dan demokrasi, manfaat Pemilu serentak di Provinsi Lampung, serta evaluasi bersama mengenai pelaksanaan pilkada serentak khususnya bagi pemilih pemula, dan politik identitas.

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan *pre-test*. *Pre-test* dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi awal peserta sosialisasi baik aspek *kognisi* dan *skill* peserta tentang politik identitas dan politisasi identitas sebelum mengikuti sosialisasi. Hasilnya akan tergambar mengenai seberapa jauh pemahaman mereka terhadap topik yang akan dipelajari. Hasil *pre-test* membantu untuk mengetahui area yang perlu mendapatkan perhatian khusus atau penguatan selama pelatihan atau pembelajaran. Ini membantu fasilitator untuk menyampaikan materi agar lebih efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan problem dalam aktivitas pengabdian ini dimulai dengan menjangkau terlebih dahulu *kognisi* dan

pemahaman peserta sosialisasi tentang pengertian Pemilu dan demokrasi dan politik identitas yang dilakukan melalui pre test. *Pre test* dilakukan untuk menjajagi pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi tentang pengertian politik identitas pada pemilu, problem dan pemecahan masalah.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Kondisi Saat Ini	Threatment	Kondisi yang Diharapkan
1.	Banyak pemilih Pemula belum mendapatkan sosialisasi pemilu demokratis.	Memberikan sosialisasi mengenai konsep Pemilu dan demokrasi.	Mahasiswa memahami konseptual maupun praksis tentang hubungan Pemilu dan demokrasi.
2.	Pemilih Pemula belum memahami tentang tujuan Pemilukada serentak	Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pemilukada serentak	Peserta memahami tujuan dan substansi Pemilu serentak.
3.	Sosialisasi Pemilu jarang dilakukan di kampus jarang dilakukan.	Sosialisasi pendidikan politik bagi mahasiswa.	Pemilih pemula memahami politik identitas

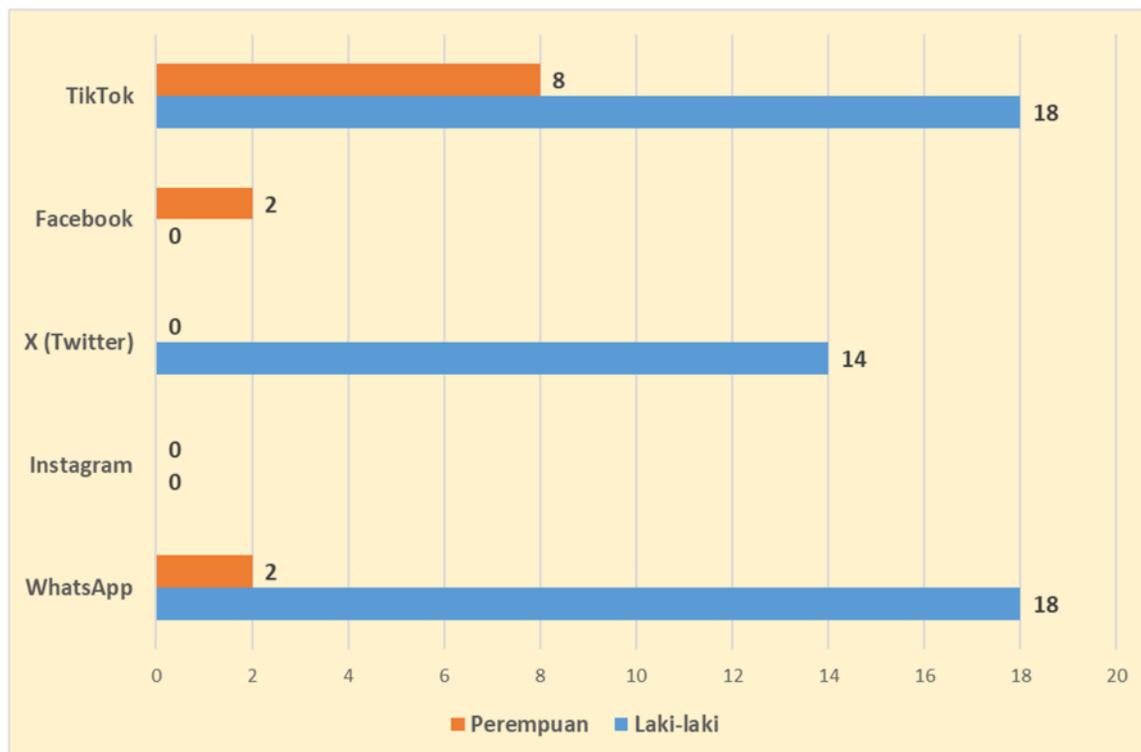
Sumber: Olahan data *pre-test* pengabdian, 2024.

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa pemilih pemula membutuhkan materi sosialisasi bagi kelompok sasaran yaitu tentang konsep demokrasi dan pemilu, politik identitas, problematika politik identitas dan solusi.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Berdasarkan hasil sosialisasi dan diskusi, dapat diperoleh kejelasan bahwa media sosial atau situs web jejaring sosial merupakan media yang sangat kuat dalam penyaluran berita tentang pemilihan umum. Media sosial menjadi akses yang memudahkan pemilih pemula memperoleh informasi tentang pemilu, isu-isu dalam pemilu, termasuk politik identitas. Isu tentang politik identitas menjadi menarik diikuti pemilih pemula meskipun mereka tidak suka dengan permainan politik identitas yang dijadikan sebagai media untuk pemenangan.

Ketidaksukaan itu karena pemilih pemula merasa politisasi identitas sengaja dimanfaatkan para kandidat untuk memperoleh dukungan politik. Berbagai media sosial seperti *TikTok*, *Facebook*, *X (Twitter)*, *Instagram*, *WhatsApp* merupakan media sosial yang paling sering dibuka pemilih pemula. Dari media sosial tersebut pemilih pemula memperoleh informasi.



Grafik 1. Perolehan Info Tentang Pemilu

Sumber data: Olahan data hasil pengabdian, 2024.

Mahasiswa yang ikut pengabdian berada di usia 19-22 tahun, semuanya pengguna media sosial dan juga pengguna aktif *social messenger*, baik *TikTok*, *Facebook*, *X (Twitter)*, *Instagram*, dan *WhatsApp* baik laki-laki maupun perempuan. Namun, pengguna *TikTok* untuk memperoleh info tentang pemilu lebih tinggi laki-laki (90%) karena hanya 8 (40%). Dalam hal ini terdapat 10% laki-laki pengguna *TikTok* untuk memperoleh info selain pemilu, sedangkan 12 (60%) perempuan pengguna *TikTok* untuk memperoleh info selain pemilu. Laki-laki pengguna *face book* untuk memperoleh info pemilu lebih banyak 2 (11,5%) daripada Perempuan (0%). Laki-laki pengguna *Facebook* untuk memperoleh info pemilu tetapi tidak ada perempuan pengguna *Facebook* untuk memperoleh info pemilu atau dengan kata lain Perempuan menggunakan *face book* untuk info non pemilu. Laki-laki pengguna *X (Twitter)* lebih banyak untuk memperoleh info pemilu 14 (35%), dan tidak ada perempuan pengguna *X (Twitter)* untuk memperoleh info pemilu. Pengguna *WhatsApp* laki-laki 18 (90%) untuk mencari info pemilu, perempuan 10% saja. Untuk konteks ini, aplikasi *Instagram* tidak digunakan untuk info pemilu baik laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan *pre-test* dan *post-test* diperoleh gambaran tentang persepsi mahasiswa tentang *hoak*, ujaran kebencian, intoleransi, anti NKRI dan Anti Pancasila dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Persepsi Tentang Aktivitas *Hoak*, Ujaran Kebencian dan Intoleransi , Anti NKRI dan Anti Pancasila.

Aktivitas Tentang	Pre Test			Post Test		
	Aspek Sosial	Aspek Politik	Aspek Hukum	Aspek sosial	Aspek politik	Aspek Hukum
Ragam kampanye hitam (<i>hoax</i> , fitnah)	buruk	buruk	tidak tahu	merusak	merusak	melanggar hukum
Isu intoleransi dan kebencian	buruk	buruk	tidak tahu	konflik	konflik	melanggar hukum
Kampanye anti NKRI	buruk	buruk	tidak tahu	berbahaya	perpecahan	melanggar hukum
Kampanye Anti Pancasila	buruk	buruk	tidak tahu	berbahaya	perpecahan	melanggar hukum

Sumber: Olahan data hasil pengabdian, 2024.

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa mahasiswa semakin memahami tentang pengertian kampanye anti Pancasila, kampanye anti NKRI, intoleransi dan kebencian, kampanye hitam; memahami perbedaannya, bentuk-bentuknya, serta bahayanya dari aspek sosial, politik dan hukum. Penyebaran kampanye anti NKRI, penyebaran kampanye anti Pancasila pada mahasiswa yang berusia 19-22 tahun baik pada laki-laki dan perempuan secara sosial dan politik adalah buruk, melanggar, merusak, menimbulkan perpecahan dan konflik antar individu dan kelompok di masyarakat, dan hal itu berbahaya bagi keutuhan NKRI.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa mahasiswa baru tahu kalau kampanye hitam itu dilarang dan ada sanksi hukumnya. Mahasiswa baru mengetahui bahwa tindakan penyebaran *hoaks* (berita palsu), yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar yang tujuannya untuk menghancurkan kebaikan seseorang atau kelompok politik. Pencemaran nama baik merupakan penyebaran berita yang tidak benar, tindakan fitnah atau informasi yang tidak benar tentang seseorang atau kelompok untuk merusak kepribadian atau integritas mereka; Provokasi dan penghasutan pada orang lain untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, yang sumbernya tidak jelas dan salah.

Penyebaran konten negatif atau kebencian, merupakan kampanye hitam yang sanksinya tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; Pada ketentuan pasal 280 ayat (1) UU Pemilu disebutkan bahwa peserta kampanye tidak boleh melakukan fitnah, provokasi, dan penghinaan terhadap

calon lain, parpol, atau mereka yang terlibat dalam pemilihan umum. Kegiatan kampanye harus dilakukan dengan cara yang santun, menjunjung tinggi etika dan kebenaran dalam menyebarkan informasi ; Ketentuan pada pasal 492 Undang-Undang Pemilu memuat sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kampanye hitam, yaitu pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 (dua belas) juta rupiah; Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Selain itu, melakukan kampanye hitam melalui media elektronik, termasuk media sosial, diberikan sanksi berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan hoaks. Bagi yang terbukti menyebar informasi yang menyesatkan dan merusak reputasi orang lain bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta rupiah;

Ditegaskan di ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penyebaran berita bohong yang merugikan pihak lain akan dikenakan pidana penjara sampai enam tahun penjara dan denda paling banyak satu milyar; Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kampanye hitam yang dilakukan dengan menyebarkan fitnah atau informasi palsu dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang berisi aturan tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita fitnah; Pasal 310 KUHP berisikan aturan pencemaran nama baik, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda; Sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik semakin diperberat sebagaimana yang tertuang pada di ketentuan 311 KUHP, bahwa pelaku dikenai dipidana penjara sampai empat tahun. Selain sanksi pidana, Badan Pengawas Pemilu juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kampanye hitam yang dilakukan selama pemilu atau pilkada. Sanksinya berupa sanksi administratif, yaitu peringatan keras bagi pelaku kampanye hitam; Pembatalan hasil pemilu apabila kampanye hitam terbukti merusak proses pemilu dan mempengaruhi hasil yang sah, penghentian kampanye bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Serangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan mengenai sosialisasi tentang politik identitas bermanfaat bagi pemilih pemula telah berdampak dan memperoleh hasil sebagai berikut ini:

1. Mahasiswa memahami bahwa kebebasan merupakan hak dasar warga negara. Hak dasar ini wajib disediakan oleh negara dan berbagai institusi yang ada di masyarakat, dan oleh masyarakat. Politik identitas sebagai cara-cara berpolitik yang menghilangkan kebebasan di dalam memilih, perlu diperjuangkan untuk tidak berkembang, tidak digunakan sebagai dasar untuk memilih seorang

kandidat. Memilih harus didasarkan rasionalitas bahwa yang dipilih adalah kandidat yang mampu memimpin, tidak korup, terlihat dari perilaku yang selama ini ditunjukkan.

2. Mahasiswa memahami bahwa politik identitas menutup ruang untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Meskipun masyarakat berpartisipasi tetapi ruang pada pemilu tetapi tidak menumbuhkan demokrasi, yang tumbuh justru *oligarkhi*. Hal itu tampak pada pilihan orang yang menduduki jabatan berasal dari etnis, keluarga, atau orang memberikan jasa pada pemilihan. Idealnya demokrasi mampu membawa semua lapisan masyarakat terlibat secara merdeka dalam memilih sehingga pilihannya menginspirasi kepentingan dalam penentuan kebijakan negara.
3. Idealnya pemilu merupakan media untuk mengelola konflik, tetapi politik identitas justru menciptakan konflik, karena terjadi memobilisasi kekuatan politik. Dampaknya terjadi peningkatan polarisasi, diskriminasi, dan ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan politik identitas dengan upaya untuk membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial guna mencegah konflik yang merusak.
4. Mahasiswa memahami bahwa politik identitas banyak disampaikan di media sosial. Mahasiswa telah mengetahui bahwa politik identitas yang selama ini termuat di media sosial seperti menjelekkan suku lain, agama lain itu buruk, atau ideologi tertentu dijadikan para kandidat sebagai jalan untuk *membranding* dirinya sendiri tetapi dilakukan juga untuk memperburuk kandidat lain merupakan tindakan terlarang. Politisasi identitas telah dipahami sebagai cara untuk memanfaatkan, menyalahgunakan, mengeksploitasi, muslihat, yang mendasarkan agama, suku, ajaran, aliran tertentu untuk membangun pandangan negatif masyarakat untuk mengalahkan lawan politik.

4. PENUTUP

Sosialisasi yang baik tentang politik identitas dapat mengurangi potensi radikalisasi dan intoleransi di kalangan pemilih pemula. Pemilih yang tidak memahami politik identitas dengan baik lebih mudah terjerat dalam retorika yang mengarah pada ekstremisme atau tindakan intoleran terhadap kelompok lain. Dengan memberi pemahaman tentang bahaya politik identitas, pemilih pemula lebih waspada terhadap narasi yang mengarah pada kebencian atau kekerasan. Sosialisasi politik identitas sangat penting bagi pemilih pemula untuk membantu memahami dampak negatif dari politik identitas dan menghindari terjebak dalam narasi yang memecah

belah. Sosialisasi yang tepat bagi pemilih pemula membuat pemilih pemula mampu membuat keputusan politik yang rasional, berbasis kebijakan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Evita, N. (2023). Generasi Z dalam pemilu: Pola bermedia generasi Z dalam pencarian informasi politik. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 47–66. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1051>
- Fajri. (2023). Dominasi Politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia serta mitigasinya jelang pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 5(2), 1–14. <http://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/436%0Ahttp://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/download/436/80>
- Fernandes, R., Ananda, A., Montessori, M., Putra, E. V., & Tiara, M. (2023). Efektivitas pendidikan pemilih intrakurikuler dalam mata pelajaran sosiologi untuk membentuk ketahanan demokrasi (Studi pada siswa SMAN 7 Sekolah Penggerak, Kota Padang, Sumatra Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 18. <https://doi.org/10.22146/jkn.82319>
- Hariyanti. (2023). Pendidikan pemilih untuk pemilih pemula melalui pembelajaran PPKN di persekolahan. *Bhineka Tunggal Ika*, 10(2), 160–168.
- Hutabarat, J. M. (2024). Media sosial menjadi strategi politik masa kini. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 2(1), 204–214. <https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i1.2318>
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2018). Pendidikan pemilih dan penguatan demokrasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129-148.
- Setiawan, H. D., & Jakfar, T. M. (2023). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Wingarta, Berlian Helmy, Hartono, D., I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>